

PENGUATAN *BARGAINING POWER* KADER PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) JAWA TIMUR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN PARTAI

Naila Adibah

(PPKn, FISH, UNESA) nailaadibah1604025444@mhs.unesa.ac.id

Oksiana Jatningsih

(PPKn, FISH, UNESA) oksianajatningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kader perempuan di DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur dalam membangun *bargaining power* dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain eksploratif. Subjek dalam penelitian adalah kader perempuan DPWPKS Jawa Timur berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive karena mempunyai *power* dalam partai tersebut. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara yang dilakukan secara online dengan kelima informan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Teknik analisis yang digunakan yaitu, analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai data jenuh melalui: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori *Bargaining Power* dari Schelling yang mengungkapkan bahwa orang yang kuat, cekatan, dan terampil cenderung memiliki *bargaining power* yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Bargaining Power* kader perempuan di dewan pengurus wilayah PKS Jawa Timur dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai dilakukan dengan menjadi bagian dari struktur fungsional tertinggi partai pada Badan Pengurus Harian (BPH). Kader perempuan memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai sesuai dengan kapasitas individualnya sebagai hal penting dalam penentuan *bargaining position*nya. Pada internal partai, memiliki jabatan atau posisi tertinggi partai sebagai BPH, penting bagi perempuan agar dapat turut menjadi pengendali roda kegiatan organisasi. Di lingkup eksternal, kekuatan menentukan keputusan dilakukan melalui keanggotaan perempuan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan masuk di DPTW PKS Jatim Dewan Pimpinan Tinggi Wilayah. *Bargaining Power* perempuan di DPW PKS dilakukan melalui struktur formal organisasi baik internal maupun eksternal, yang memberinya kesempatan untuk melakukan *threat* dan *promise* yang mempengaruhi kebijakan partai.

Kata Kunci: PKS, *bargaining power*, kader perempuan.

Abstract

This study aims to describe the female cadres in the DPW (Regional Management Board) of the Prosperous Justice Party (PKS) in East Java in building bargaining power in decision making or party policies. The research method used is qualitative with exploratory design. The subjects in the study were five women cadres of the East Java DPWPKS who were chosen purposively because they had power in the party. The data obtained in the form of interviews conducted online with five informants who meet the specified criteria. The analytical technique used is qualitative analysis which is carried out interactively continuously until the data is saturated through: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is the Bargaining Power theory from Schelling which reveals that people who are strong, agile, and skilled tend to have high bargaining power. The results showed that the Bargaining Power of female cadres in the East Java PKS regional management board in making party decisions or policies was carried out by being part of the party's highest functional structure at the Daily Management Board (BPH). Women cadres have the power to make decisions or party policies in accordance with their individual capacities as important things in determining their bargaining position. In the internal party, having the highest position or position of the party as BPH, it is important for women to be able to participate in controlling the wheels of organizational activities. In the external sphere, the power to make decisions is exercised through the membership of women as members of the East Java Provincial DPRD and inclusion in the East Java PKS DPTW, the Regional High Leadership Council. Women's Bargaining Power in the PKS DPW is carried out through the formal structure of the organization, both internal and external, which gives her the opportunity to carry out threats and promises that influence party policies.

Keywords: PKS, *bargaining power*, female cadres.

PENDAHULUAN

Menciptakan negara demokratis, diawali dari adanya kelompok atau komunitas yang mampu menuangkan

aspirasi rakyat. Salah satu kelompok atau komunitas tersebut adalah partai politik. Partai politik adalah komunitas atau kelompok yang dapat mempersatukan ideologi, cita-cita, atau pemikiran terkait pengelolaan

kekuasaan negara. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Budiarjo, 2008:397). Dengan membentuk organisasi partai politik diharapkan orang-orang dengan pemikiran serupa dapat bersatu. Pemikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan, sehingga pengaruh mereka menjadi lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Budiarjo, 2008:403).

Partai politik berperan dalam menyalurkan keinginan rakyat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Untuk dapat menyalurkan aspirasi dan keinginan dari rakyat, maka partai politik berlomba-lomba untuk merekrut atau menunjukkan kandidat anggota terbaiknya. Di Indonesia partai politik bergerak sangat dinamis, terbukti bahwa terdapat lebih dari tiga partai politik yang menduduki kursi pemerintahan. Sedangkan dalam pertarungan pemilihan umum, partai politik di Indonesia sangat beraneka ragam dan memiliki berbagai ideologi yang berbeda. Namun kenyataannya, kesetaraan keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam partai politik di Indonesia tidak berjalan baik.

Keterlibatan laki-laki dalam partai politik sangatlah dominan. Seiring dengan peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk dunia politik, maka perempuan “dikondisikan” kehadirannya dalam dunia politik. UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengurus partai politik sekurang-kurangnya 30% menyertakan perempuan dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif DPR, DPRD dan DPD, menyebutkan dalam rekrutmen calon legislatif 30% adalah caleg perempuan. Namun, kesiapan perempuan calon legislatif tidak lepas dari partai masing-masing sehingga memungkinkan terjadi kurangnya pemenuhan kuota 30% yang diberikan.

Pasca reformasi tahun 1999, gerakan politik perempuan mulai terlihat, aksi penyadaran terhadap kaum perempuan agar berpartisipasi kembali dalam politik diusung dengan agenda mendorong partai peserta pemilu supaya lebih memperhatikan kepentingan perempuan serta mendorong keterlibatan perempuan lebih banyak dalam partai politik dan lembaga legislatif.

Dalam kehidupan politik, kesetaraan dapat tercapai jika terdapat keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan tersebut memberikan efek semakin kecilnya peluang terjadinya saling menindas. Dalam penelitian dari Sutarso (2018) menjelaskan jika dalam parlemen ataupun pemerintahan jumlah laki-laki dan perempuan sama, maka kepentingan perempuan tidak akan terpinggirkan, sebaliknya demikian pula kepentingan laki-laki.

Perempuan berpotensi menjadi pemimpin, sebagaimana halnya laki-laki. Perempuan dalam menentukan pekerjaannya tidak ada larangan untuk

memilih baik dalam domestik maupun terlibat dalam ruang publik selama dapat dilakukan dengan suasana terhormat, sopan, dan tetap memelihara agamanya. Melihat realitas kehidupan zaman modern sekarang ini perempuan sudah banyak terlibat dalam kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan mampu diperankan oleh perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Artinya, jenis kelamin tidak menentukan potensi kepemimpinan seseorang.

Namun, budaya patriarki seolah memberi ketegasan bahwa antara perempuan dan politik merupakan dunia yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lain. Dunia perempuan meliputi wilayah domestik, dan jika ingin berkarir di luar rumah maka pekerjaan/karir tersebut bukan hal yang utama. Perempuan diharuskan siap memainkan peran ganda, sebagai ibu dan perempuan bekerja. Sedangkan politik adalah tempat bagi laki-laki karena dianggap cocok dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, penuh manuver, serta identik dengan uang dan kekuasaan.

Pada zaman sekarang kemampuan perempuan bisa disandingkan dengan laki-laki terutama dalam hal berpolitik. Dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang bisa membuktikan kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin seperti Megawati Soekarno Putri yang pernah menduduki jabatan sebagai presiden Indonesia, dan juga terdapat Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya, dan sebagainya. Kedua contoh tersebut dapat dijadikan inspirasi bagi perempuan untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan.

Keikutsertaan perempuan dalam lingkup publik seperti terjun dalam dunia politik, pendidikan, dan ekonomi adalah hak yang dimiliki tiap individu. Faktanya, dalam konteks politik, peran dan posisi perempuan cukup mengalami diskriminasi. Peran dan posisinya dalam pengambilan kebijakan masih sangat minim; mayoritas perempuan di Indonesia masih buta terhadap wacana politik (Wahyudi, 2018).

Pada Pemilu 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 100 anggota perempuan atau 17,8% yang diantaranya tiga perempuan dari partai PKS. Sayangnya, jumlah itu turun sedikit menjadi 17, 32% di Pemilu 2014 yaitu sebanyak 97 perempuan di antaranya terdapat satu anggota perempuan dari PKS. Pada pemilu 2019, dari total 560 anggota DPR RI, 97 di antaranya adalah perempuan dan terdapat tujuh anggota perempuan dari partai PKS. Angka-angka itu sekaligus menunjukkan bahwa kuota 30% perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya termaksimalkan (<https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>).

Berdasarkan hasil pemilu dari tahun ke tahun, tidak banyak perempuan yang terlibat dalam dunia politik. Peran perempuan di bidang politik, termasuk penentu kebijakan di pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, desa sekalipun masih didominasi laki-laki. Astuti (2008:3) menjelaskan bahwa secara statistik, peran perempuan Indonesia di dunia publik yang terkait dengan politik masih belum menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki dan berpotensi mengabaikan kepentingan perempuan.

Posisi perempuan dalam politik pun sering tidak berada di posisi yang strategis. Nugroho (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa selama ini fakta yang terlihat yaitu, pertama, posisi pengambil keputusan, masih didominasi laki-laki misalnya sebagai ketua fraksi pada lembaga legislatif atau bahkan ketua dewan legislatif. Kedua, dalam wilayah politik, perempuan cenderung mengalah untuk tidak menonjolkan diri di lingkup perkumpulan laki-laki. Ketiga, perempuan cenderung memutuskan untuk membuat perkumpulan sendiri, dan memisahkan diri dari perkumpulan laki-laki. Ketiga fakta tersebut memperlihatkan, bahwa perempuan belum memiliki kebebasan dalam berpolitik, karena masih berada di bawah bayang-bayang laki-laki.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik yang berasaskan Islam. Hal tersebut telah tertulis secara gamblang di AD-ART partai. Tujuan dari PKS adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Visi partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Misi partai adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridloi Allah *subhanahu wa ta'ala*, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai da'wah menyatakan dirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan da'wah di berbagai kawasan dunia. Kegiatan dakwah tidak bisa dilepas untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Menurut Haris (dalam Fitriyah, 2013:26) eksistensi Partai Keadilan Sejahtera sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: (1) faktor internal, seperti konsolidasi partai yang menyangkut rekrutmen anggota maupun menyangkut pengkaderan anggota, popularitas partai, kampanye yang dilakukan partai pada

saat Pemilu, calon legislatif yang ditampilkan partai serta pimpinan formal/informal yang ada didalam partai. (2) faktor eksternal, seperti pelaksanaan pemilu, kondisi system politik yang sedang berlangsung, misalnya perubahan sistem dwi partai menjadi multi partai

Partai Keadilan Sejahtera menjadi fokus pada penelitian ini, karena dalam pemilu legislatif di DPRD provinsi Jawa Timur tahun 2019, PKS mengusung hampir 50% calon perempuan. Hal ini patut untuk diapresiasi karena PKS menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan hanya setengah dari tahun 2019. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang berideologi Islam dengan keterwakilan perempuan terbanyak dibandingkan dengan partai berideologi Islam yang lain.

Tabel 1 Calon Legislatif pada Partai Islam dalam Pemilu Legislatif Jawa Timur 2019

Nama Partai Islam	L	P	Jumlah
Partai Kebangkitan Bangsa	75	45	120
Partai Keadilan Sejahtera	65	49	114
Partai Persatuan Pembangunan	69	45	114
Partai Amanat Nasional	69	47	116
Partai Bulan Bintang	50	35	85

Sumber: KPU Jawa Timur tahun 2019

Meskipun partisipasi perempuan sudah semakin meningkat, hal ini tidak berarti bahwa perempuan sudah memiliki kebebasan untuk berpolitik sesuai dengan harapan dan keinginan pribadinya. Apalagi jika melihat latar belakang partai PKS yang merupakan ideologi Islam, yang berpegangan pada Al-Quran dan hadits dan sebagaimana karakteristik "partai Islam" cenderung menempatkan perempuan tidak sebagai tokoh penting dalam politik. Banyak anggapan bahwa Islam adalah agama maskulin yang mengistimewakan laki-laki. Wajar saja jika melihat fakta bahwa perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis dalam internal PKS masih sangat sedikit, seperti Majelis Syuro PKS yang didominasi oleh laki-laki.

Banyak kendala yang menyebabkan perempuan terhambat di dunia politik. Very Wahyudi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender" menjelaskan bahwa representasi politik perempuan di parlemen di bawah target karena beberapa kendala, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yaitu sebagian besar kualitas sumber daya kaum perempuan masih lemah, jumlah perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi mumpuni di bidang politik masih terbatas, dan mempunyai rasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Sedangkan kendala eksternal adalah budaya patriarki masyarakat Indonesia yang masih dominan, ketiadaan kemauan politik elite-elite

partai untuk membuka ruang luas bagi keterlibatan kaum perempuan, dan sebagian kaum laki-laki yang mempunyai sikap meremehkan kemampuan perempuan di bidang politik. Akibatnya, kuota 30% perempuan di parlemen tidak terpenuhi.

Perempuan hadir dalam politik, tetapi kehadirannya ternyata terkendala oleh banyak faktor yang mungkin membuatnya “terpenjara dan termarginalkan” dalam dunia kerjanya di politik. Bernegosiasi dalam mengambil keputusan mungkin terjadi dalam proses-proses politik, tetapi dalam proses itu mungkin saja perempuan memiliki posisi yang tidak sama sebagaimana halnya laki-laki. Hal inilah yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini ingin melihat bagaimanakah *bargaining power* dibangun perempuan dalam pengambilan keputusan di PKS.

Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dilakukan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy, 1998:11).

Pada pemilu legislatif Jawa Timur tahun 2019 meskipun keterwakilan perempuan cukup banyak, tidak ada caleg perempuan yang menduduki nomor satu, hanya terdapat beberapa kader perempuan partai yang menduduki posisi nomor dua. Penempatan tersebut didasarkan atas popularitas, elektabilitas, potensi, dan target partai. Meskipun terdapat banyak anggota perempuan di PKS, namun struktur kepengurusan partai masih didominasi oleh laki-laki, hanya satu perempuan yang menduduki posisi sekretaris, posisi yang memang dipandang cocok untuk perempuan dalam dunia kerja, karena dianggap cocok dengan stereotipe perempuan. Dari sepuluh bidang yang tersedia di DPW PKS Jawa Timur hanya dua perempuan yang menjadi Kepala Bidang yaitu bidang perempuan dan ketahanan keluarga juga bidang ekonomi, keuangan, industri, teknologi, dan

lingkungan hidup. Penetapan ketua bidang didasarkan atas musyawarah anggota.

Berdasarkan data banyaknya anggota perempuan PKS yang diikutsertakan dalam pemilu legislatif tahun 2019, namun masih sedikit perempuan yang menduduki kepengurusan partai seakan memberikan gambaran bahwa posisi perempuan dalam partai politik PKS masih terpinggirkan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana *bargaining power* kader perempuan di DPW PKS Jawa Timur dalam pengambilan kebijakan di tengah dominasi laki-laki dalam partai tersebut. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *bargaining power* kader perempuan di DPW PKS Jawa Timur dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai.

Apakah ancaman dan janji yang kredibel akan membentuk *bargaining power* dapat diketahui dengan melihat bagaimana kemampuan suatu pihak dalam memberikan ancaman (*threat*) dan janji (*promise*) yang dipercayai pihak lawan. Janji dan ancaman berbicara tentang niat atau rencana dari pihak utama kepada pihak lawan. Kemampuan untuk memberikan ancaman dan janji yang kredibel akan membentuk *bargaining power* yang kuat, sehingga akan mendapatkan kesepakatan untuk mengikuti tindakan yang diharapkan (Sekarpuri, 2018:17). *Bargaining power* merupakan situasi yang penting dalam tawar-menawar, pihak yang mempunyai posisi *bargaining power* yang kuat akan membawa keberhasilan sehingga dapat mencapai kesepakatan dan mengimplementasikannya (Sekarpuri, 2018:16).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:9) metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (tidak dimanipulasi oleh peneliti), yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang diperoleh adalah data yang terlihat, terucap, dan mengandung makna.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif. Penelitian eksploratif digunakan untuk menggali objek secara mendalam (Sugiyono, 2018:iii). Penelitian ini dirasa cocok untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksploratif karena data yang akan dihasilkan berupa data deskriptif yang berupa pernyataan seluas-luasnya dari anggota perempuan Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Timur. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara rinci keadaan yang ada dalam partai politik dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif bagaimana posisi perempuan saat melakukan tawar menawar. Bagaimanakah *bargaining power* di

dalam proses pengambilan keputusan (kebijakan) di tubuh partai.

Sumber data utama dalam suatu penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber data utama dalam penelitian ini adalah informasi yang diterima dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Data yang diperoleh berasal dari lapangan yang dilakukan secara berulang-ulang (Sugiyono, 2018:7). Sumber data dalam penelitian ini adalah penyampaian secara lisan dan tindakan yang dapat menunjukkan posisi *bargaining power* perempuan dalam partai politik.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Data Primer, Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (Waluya, 2007:79). Dalam hal ini peneliti mendapatkan data melalui wawancara dan observasi dengan anggota perempuan di DPW PKS Jawa Timur untuk mendapatkan informasi mengenai posisi *bargaining power* perempuan dalam partai politik; (2) Data Sekunder. Data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan seperti buku, buletin, majalah, laporan yang sifatnya dokumentasi (Waluya, 2007:79). Data primer dalam penelitian berupa hasil wawancara yang menunjukkan penguatan *bargaining power* kader perempuan di DPW PKS Jawa Timur dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan partai.

Informan dalam penelitian ini adalah lima kader perempuan yang ada dalam PKS.

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Hj. Lina Ariani, S.Si., Apt	46 Tahun	Ketua BPKK DPW PKS Jatim (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga)
2.	Sity Marsiyah	40 Tahun	Ketua Deputy Ketahanan Keluarga
3.	Hj. Lilik Hendarwati	47 Tahun	Sekretaris Umum DPW PKS Jatim
4.	Ratri Handayani	41 Tahun	Ketua Deputy Hubungan Kelembagaan Perempuan
5.	Santy R Madjid	47 Tahun	Ketua Deputy Kajian Perempuan

Sumber: data primer penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur jarak jauh melalui telepon, dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan beberapa kader PKS.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung-jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu

dilakukan uji keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Menurut Mathinson (dalam Sugiyono, 2018:127) dengan menggunakan triangulasi maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara pengecekan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2010:330).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:335). Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan mengungkap kader perempuan di DPW PKS Jawa Timur dalam membangun *bargaining power* dalam pengambilan kebijakan partai. Tidak mudah bagi perempuan memiliki posisi setara dengan laki-laki dalam kehidupan kepartaian dalam kehidupan yang masih didominasi oleh nilai-nilai gender patriarkhi. Karena itu perempuan perlu memiliki dan melakukan sesuatu dalam membangun kekuatannya yang akan menggambarkan posisi tawarnya dalam berpartai. Berikut ini beberapa temuan yang dapat dikemukakan.

Menjadi Bagian dari Struktur Fungsional Partai pada Badan Pengurus Harian

Setiap organisasi dan komunitas memiliki badan pengurus harian (BPH) atau yang disebut pengurus inti. Badan Pengurus Harian atau pengurus inti tersebut dapat dijadikan sebagai pusat organisasi. Struktur yang terletak pada bagian atas, menjadikan anggota yang memasuki fungsionaris tersebut memiliki peran dan beban kerja yang berbeda dengan anggota yang masuk dalam bidang lain.

Fungsi, tugas, dan peran dari BPH tergantung pada kebijakan setiap organisasi atau komunitas. Secara umum fungsi dan tugas dari pengurus inti atau badan pengurus harian adalah memberi saran dan masukan kepada ketua umum dalam mengambil kebijakan dalam organisasi. Yang kedua adalah mengawasi dan mengoordinasikan program kerja organisasi dan mempertanggung-jawabkannya kepada ketua umum. Yang terakhir menggantikan ketua umum dalam mewakili organisasi

atau mengambil kebijakan bila ketua umum berhalangan menghadiri rapat atau pertemuan.

Secara umum, kinerja dan fungsi dari BPH adalah mewakili organisasi dan komunitas dalam pembahasan suatu pertemuan atau rapat dengan organisasi lain, sehingga BPH memiliki posisi yang tepat dan penting. Badan Pengurus Harian juga berperan dalam mengkoordinasi setiap bidang agar, tujuan dan visi-misi dari organisasi tercapai.

Komunitas dan organisasi terbagi dengan berbagai macam kategori, ada organisasi yang bersifat social, politik dan profit. Organisasi atau komunitas yang bergerak dalam bidang sosial memiliki tujuan untuk dapat memberikan kualitas dan pelayanan tanpa ada laba. Sedangkan organisasi atau komunitas yang bersifat profit bergerak dalam bidang ekonomi dengan usaha memberi keuntungan anggota. Sedangkan organisasi atau komunitas yang berbasis politik adalah kumpulan orang yang menggerakkan ideologi untuk dapat bersaing dalam mewujudkan cita-cita rakyat.

Organisasi politik di Indonesia terdapat berbagai macam paradigm atau ideologi. Ada lebih dari dua organisasi politik yang ada di Indonesia. Biasanya di Indonesia organisasi politik disebut sebagai partai politik. Tercatat terdapat sembilan partai politik yang ikut berkompetensi dalam pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2019 lalu.

Dalam partai Islam seperti PKS isu yang berkembang di antara aktivis partai Islam adalah tentang peran perempuan di wilayah domestik. Artinya, perempuan mempunyai beban tanggung jawab dalam mengurus dan mengatur rumah tangga. Seperti halnya yang dikemukakan oleh salah seorang aktivis laki-laki dari PKS bahwa, menurutnyalangkah lebih baiknya perempuan itu tetap berada di rumah mengurus anak-anak dan keluarganya. Karena kewajiban utama perempuan adalah mendidik dan menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan menjadi generasi *rabbani*. Selain itu, perempuan jugaberkewajiban menjaga, memelihara dan mengatur harta suaminya. Seperti pernyataan dari Sandy R Madjid sebagai Ketua Deputy Kajian Perempuan sebagai berikut.

“Sebagai partai yang berasaskan Islam, maka nilai Islam yang sangat universal dan bisa menjawab tantangan zaman merupakan landasan seluruh perjuangan PKS mulai visi, misi, tujuan, sasaran, pengelolaan partai, pengelolaan struktur dan kader. Sampai penyiapan program yang berjalan dan yang akan dicanangkan” (Wawancara, 07 Oktober 2020).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Hj. Lina Ariani, S. Si., Apt (46 tahun) yang merupakan ketua

BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga) DPW PKS Jawa Timur sebagai berikut.

“Memang kalau PKS partai politik di Indonesia yang berideologi dari ajaran agama Islam, lebih ke umat, memperjuangkan hak umat. Dan memang partai ini partai dakwah Islam mbak” (Wawancara, 15 Oktober 2020).

Berdasarkan pernyataan kedua informan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PKS merupakan salah satu partai yang berasaskan pada ajaran agama Islam dalam berpartai di Indonesia. Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya.

Ada dua pandangan yang akan dihasilkan oleh seseorang dalam Islam tentang peran perempuan bekerja di ranah publik. Pandangan tersebut dapat digolongkan dalam ideologi gender bersifat tradisional dan ideologi gender bersifat egaliter. Pandangan atau ideologi tersebut dapat dimiliki oleh individu tergantung dari interpretasi serta konstruksi mereka terhadap suatu fenomena dan kajian yang mereka dapatkan.

Dalam PKS kader perempuan ternyata juga mendapatkan posisi structural fungsional yang atas. Seperti penjelasan dari Hj. Lina Ariani, S. Si., Apt (46 tahun):

“Kader perempuan PKS tugas tidak bersifat spesifik kader perempuan. Yang memiliki potensi kapabilitas atau kemampuan bisa mendapatkan amanah atau tugas dari partai dan di PKS semua peran yang dilakukan kader adalah satu kesatuan mulai dari: kader pengurus struktur pusat sampai ranting, kader pejabat publik, atau kader ya tidak terdefinitif pengurus, juga simpatisan adalah satu kesatuan dalam menyukseskan jalannya partai. Kader perempuan bisa jadi pengurus di Bidang DPP, DPW, DPD, DPC, DPR. Kader perempuan bisa jadi caleg calon legislatif, caleg anggota legislatif. Kader perempuan bisa jadi calon dalam pilkada atau pejabat daerah. Secara umum porsi yang banyak kader perempuannya di BPKK bidang perempuan dan ketahanan keluarga” (Wawancara, 15 Oktober 2020).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Sity Marsiyah selaku ketua deputy ketahanan keluarga.

“Kader perempuan PKS terlibat aktif dalam kegiatan eksternal dan internal. Kegiatan dimulai dari merancang kegiatan sampai aktif terlibat sebagai penggerak dan panitia (kegiatan eksternal). Adapun kegiatan internal yaitu terlibat aktif menyiapkan pembekalan kader perempuan PKS agar memiliki kapasitas sebagai kader yang memiliki kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan Negara.” (Wawancara online, 17 Oktober 2020).

Dapat dikemukakan bahwa kader perempuan PKS juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan kader laki-laki. Di PKS juga terdapat peraturan dalam setiap kadernya yang bisa diusung dalam pemilihan legislatif. Bagi kader yang dicalonkan sebagai perwakilan partai dalam pileg (pemilihan legislatif) adalah memiliki kompetensi pengetahuan yang cukup dan aktif serta cakap. Entah kader perempuan dan kader laki-laki juga memiliki kesempatan yang sama.

Kebijakan atau keputusan yang diambil oleh partai didapatkan melalui suara dari para anggota-anggota yang lain. Dalam PKS sendiri untuk menentukan siapa calon yang dimajukan dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yaitu mereka yang mumpuni dan memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Karena anggota berperan dalam penentuan calon yang akan dimajukan dalam kontestasi pilkada misalnya, maka pemahaman dan konstruksi gender mereka akan berperan penting dalam mewarnai pemberian kesempatan kepada perempuan.

Kader perempuan di PKS juga mendapatkan tempat yang setara dengan kader laki-laki. Perempuan juga mendapatkan tugas yang sama di kegiatan internal dan eksternal. Dalam kegiatan internal, kegiatan yang dilakukan oleh PKS adalah pemutusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam setiap roda kegiatan partai. Sedangkan dalam kegiatan eksternal, partai juga memiliki kegiatan dalam hubungan kemasyarakatan. Kegiatan tersebut seperti memperkenalkan visi-misi dan tujuan partai kepada khalayak umum agar dapat memilih PKS di pemilihan legislatif. Pada kedua kegiatan tersebut, baik kader perempuan dan kader laki-laki juga memiliki kesempatan yang sama. Dalam kepengurusan partai, posisi yang dipegang kader perempuan bukan hanya pada bidang perempuan saja melainkan ada pada posisi penting lain yaitu masuk pada BPH.

Seperti yang diungkapkan oleh Hj. Lilik Hendarwati selaku sekretaris umum DPW PKS Jatim sebagai berikut.

“Internal: ada dalam kepengurusan dan pengambilan keputusan, saya sendiri posisi sebagai sekretaris umum, masuk dalam BPH dan punya peran sebagai pengendali di roda kegiatan organisasi. Eksternal: saya berada di legislatif, dan aktif dalam kegiatan eksternal.” (Wawancara online, 17 Oktober 2020).

Pernyataan di atas dapat dilihat bahwa peran dari kader perempuan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) juga memiliki andil yang besar. Selain menjadi aktivis penggerak politik di partai tersebut, mereka juga ikut andil dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh partai.

Ratry Handayani sebagai Ketua Deputy Hubungan Kelembagaan Perempuan juga memiliki pendapat yang sama tentang peran kader perempuan dalam mengikuti kegiatan yang direncanakan oleh partai.

“Kader perempuan PKS secara umum aktif melakukan kegiatan-kegiatan partai yang sudah di program baik secara incidental maupun kegiatan rutin. Mereka melakukan program-program dengan senang hati karena memahami urgensi kegiatan yang memang bertujuan untuk kebaikan diri, keluarga dan masyarakat. Karena memberikan manfaat yang besar bagi kemaslahatan bersama” (Wawancara online, 19 Oktober 2020).

Hal serupa juga disampaikan oleh Hj. Lina Ariani, S. Si., Apt (46 tahun) di bawah ini.

“Secara eksternal kader perempuan melakukan kegiatan sesuai program bidang yang ada Contoh: untuk BPKK bidang perempuan dan ketahanan keluarga ada program RKI (Rumah Keluarga Indonesia) dengan kegiatan yang langsung bersentuhan dgn masyarakat dengan delapan fokus kegiatannya yaitu: 1. pos ekonomi keluarga, 2. pendidikan politik, 3. pembekalan pranikah, 4. harmonisasi suami istri, 5. pendidikan orang tua, 6. sahabat anak remaja, 7. konseling keluarga 8. pembinaan lansia melakukan interaksi, membawa kebaikan perbaikan di masyarakat. Kader perempuan yang memiliki potensi kapabilitas/kemampuan juga mendapat Tugas bisa jadi pengurus di Bidang DPP, DPW, DPD, DPC, DPra. Bisa juga menjadi calon legislatif, calon dalam pilkada atau pejabat daerah.” (15 Oktober 2020).

Kegiatan yang dilakukan oleh PKS melibatkan seluruh komponen, tanpa memandang gender dan jenis kelamin. Kader perempuan PKS terlibat aktif dalam kegiatan eksternal dan internal. Kegiatan dimulai dari merancang kegiatan sampai aktif terlibat sebagai penggerak dan panitia kegiatan. Tujuan dari adanya kegiatan yaitu untuk meningkatkan kualitas para kader serta dapat menarik simpatikan terhadap PKS. Fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedang dilakukan partai politik. Adapun peran partai politik berdasarkan fungsi-fungsi partai politik adalah melakukan komunikasi politik, negosiasi politik, *lobby* politik, negosiasi politik, dan mediasi politik.

Seperti dalam hasil wawancara yang didapatkan, partai PKS memiliki kegiatan komunikasi politik dalam PKS adalah seperti rapat penyuluhan dan pemilihan legislatif dalam partai. Untuk kegiatan negosiasi politik, adalah kegiatan para anggota dalam menentukan dengan kriteria dari usulan berbagai calon. Jadi, *bargaining power* kader perempuan di dewan pengurus wilayah PKS Jawa Timur dalam pengambilan keputusan/kebijakan partai adalah memasukkan kader perempuan dalam struktur tinggi PKS yaitu BPH. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi perempuan setara dalam struktur pengurus tertinggi partai. BPH tidak hanya diisi oleh laki-laki saja namun perempuan juga dapat

menduduki posisi tersebut dan dapat menjadi pengendali di setiap kegiatan partai.

Menjadi Kader Perempuan yang Berkualitas agar Diusung menjadi Calon Legislatif

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang menyebutkan dalam AD-ART Pasal 2 ayat (1) bahwa PKS merupakan partai yang berasaskan Islam. Kontribusi perempuan dimulai dengan rekrutmen perempuan. Pasal 9 ayat 1 AD-ART PKS menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi anggota PKS. Rekrutmen anggota laki-laki dan perempuan pun dilakukan dengan tahapan dan proses yang sama.

Seperti ungkapan dari Santy (40 tahun) di bawah ini: “kalau di PKS ini yang menjadi kader aktif untuk perempuannya ada 20 orang mbak. Dan untuk yang menjadi bagian BPH (Badan Pengurus Harian) atau di jajaran tinggi itu ada 10 orang mbak. Ada yang jadi sekretaris dan ketua departemen. Pemilihan itu yang dilakukan kepada orang yang memiliki kualitas pada kepemimpinan mbak.” (Wawancara, 11 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Santy (40 tahun) bahwa keterpilihan perempuan dalam struktur kepengurusan karena adanya faktor keunggulan dari setiap individu. Dalam kepengurusan PKS pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan atau peluang untuk dapat menjadi seorang pengurus partai pada posisi tertinggi. Hal tersebut dijelaskan oleh Santy (40 tahun) sebagai berikut.

“baik itu laki-laki atau perempuan ya mbak, di kepengurusan ini yang baik, yang kualitasnya itu baik ya dipilih. Jadi kalau yang dipilih laki-laki ya tidak mbak. Karena kalau dia kualitas akan membawa PKS ini sebagai partai yang memiliki nama yang bagus. Masyarakat juga nanti memberikan persepsi kepada partai mbak. Kalau perempuan dan laki-laki tersebut bagus ya dicalonkan jadi DPR atau jadi kepala daerah mbak.” (Wawancara online, 11 Desember 2020).

Relasi perempuan dan agama menjadi wacana yang sangat dibicarakan dalam PKS. Perempuan yang selalu diidentifikasi memiliki peran domestik, dan laki-laki pada ruang publik. Namun, dari realitasnya perempuan dalam partai mendapatkan tempat dan memiliki ruang untuk Berjaya di ranah publik.

Tugas yang diberikan oleh partai kepada kader perempuan juga sama halnya dengan tugas partai yang diberikan kepada kader laki-laki. Seperti yang diungkapkan oleh Hj. Lina Ariani, S. Si., Apt (46 tahun) sebagai berikut.

“tugas tidak bersifat spesifik kader perempuan. Yang memiliki potensi kapabilitas/kemampuan bisa mendapatkan amanah/tugas dari partai dan di PKS semua peran yang dilakukan kader adalah satu kesatuan mulai dari: kader pengurus struktur pusat sampai ranting, kader pejabat publik, atau kader ya tidak terdefinitif pengurus, juga simpatisan adalah satu kesatuan dalam menyukseskan jalannya Partai. Kader perempuan bisa jadi pengurus di Bidang DPP,DPW,DPD,DPC,DPR. Kader perempuan bisa jadi caleg calon legislatif. Kader perempuan bisa jadi calon dalam pilkada atau pejabat daerah. Secara umum porsi yang banyak kader perempuannya di BPKK bidang perempuan dan ketahanan keluarga.” (15 Oktober 2020).

Menurut Hj. Lina Ariani tugas yang biasanya diberikan partai kepada kader perempuan tidak memiliki kriteria khusus, kecuali kualitasnya. Ada beberapa tugas yang diberikan partai untuk kadernya dengan syarat kader memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang baik maksudnya bahwa individu tersebut memiliki keterampilan dan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga dapat mewakili suara partai dalam pemilihan.

Hj. Lina Ariani juga menambahkan sebagai berikut.

“Dalam menjalankan roda Partai, PKS mengedepankan musyawarah atau syuro bahasa Arabnya, maka majelis tertinggi partai tingkat pusat adalah Majelis Syuro. Maka aktifitas partai pun tidak lepas dari namanya musyawarah termasuk ketika akan menempatkan kader perempuan dengan amanah/tugas dari partai. Setelah musyawarah mendapat mufakat serta hasil, maka ada pengumuman, surat keputusan, penetapan, penugasan. Kader perempuan dilatih dikondisikan untuk bersiap menerima amanah tugas (dengan tetap melihat kemampuan kapabilitas, kondisi pendukung yang lain).” (15 Oktober 2020).

Santy R Madjid juga mengungkapkan hal yang sama, sebagai berikut.

“Terkait bab Pelibatan kader perempuan dalam aktifitas partai baik sebagai pengurus dan pelibatan dalam setiap aktifitas diantaranya berlandaskan pada: a. Quran Surat AnNahl(16): 97; b. Hadist Nabi S. A. W. bahwa Sebaik baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Maka aktifitas internal maupun eksternal partai selalu melibatkan kader perempuan. Kegiatan internal seperti pembinaan kader, kegiatan struktural, dan lain-lain. Maupun kegiatan eksternal: pembinaan keluarga dan masyarakat Indonesia melalui misalnya Rumah keluarga Indonesia, advokasi hukum, perjuangan dan pendampingan tani dan nelayan, bantuan medis, aksi tanggap bencana, komunikasi dengan tokoh sesuai level kepengurusan (misalnya menjalin komunikasi dan kerjasama dengan gubernur, berkomunikasi dengan ormas tingkat propinsi

untuk pengurus tingkat propinsi). Dan masih banyak lagi yang lain.”

Menurutnya, partai memang memiliki ideologi yang berasaskan pada syariat Islam. Namun perempuan yang mempunyai kredibilitas, integritas, capabilitas, dan elektabilitas terus diberikan kesempatan dalam berpolitik. Perempuan tetap menjalankan kodratnya sebagai individu yang memiliki peranan dalam ranah domestik, tapi didesain dalam tugas pengurusan domestik secara bersama kepada masyarakat.

Setiap kader perempuan di PKS memiliki peranan penting dalam setiap programnya. Namun, mereka juga tidak melupakan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh partai memiliki pengelolaan waktu tertentu. Partai memiliki kelonggaran waktu bagi para kader perempuan untuk menjalankan program kerja yang mereka usulkan. Seperti yang disampaikan oleh Hj. Lina Ariani, S.Si., Apt (46 tahun),

“Sebenarnya partai itu memberikan kebebasan kita (kader perempuan) untuk memilih menjalankan program kerja tersebut mbak. Contoh, ada kegiatan bakti sosial itu kita menjalankannya di saat para kader perempuan tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Ada kan yang bekerja jadi guru, ada yang jadi ibu rumah tangga dan banyak mbak. Makanya kita lakukan program kerja yang tidak mengganggu pekerjaannya. Dan kegiatan ini juga bebas untuk dilakukan oleh para kader perempuan. Kalau di saat pekerjaan mereka terkendala izin dari suami pastinya ada upaya mbk dari para kader perempuan untuk membujuk. Toh memang dari awal keterlibatan mereka di partai harus izin, jadi untuk peristiwa itu suami mendukung mereka walaupun tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu” (Wawancara, 25 Januari 2021).

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Santy R. Madjid di bawah ini:

“Kalau untuk masalah seperti itu mbk, keterlibatan perempuan atau ibu rumah tangga ini dari awal sudah mendapatkan izin. Jadi kalau permasalahan seperti itu tidak ada. Karena dari awal sudah izin dan sudah mendapati konsekuensinya mbk. Kan memang kita bekerja untuk UMMAT. Kalau ada kepentingan seperti anak sakit dan kepentingan mendadak ya itu bisa mbak.” (Wawancara, 23 Januari 2021).

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh kedua informan di atas, maka dapat dilihat bahwa kader perempuan PKS memiliki peranan penting dalam setiap tugas yang dilakukan partai. Namun mereka juga tidak melupakan tugasnya sebagai ibu ketika sudah berkeluarga. Dan sesuai dengan pengalaman dari para kader, keluarga selalu memberikan izin untuk melakukan kegiatan partai tanpa adanya pembagian peran domestik di rumah.

Partai ini secara rutin terlibat dalam program pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan. Dengan sistem kaderisasi yang teratur, PKS membangun militansi kadernya. Kader membiayai keterlibatan diri mereka dalam agenda politik dan tidak bergantung pada figur. PKS secara konsisten memberikan dukungan bagi perjuangan umat Islam di seluruh dunia lewat lobi di parlemen, demonstrasi, maupun penggalangan dana. Dalam setiap demonstrasi maupun kampanye mereka, PKS dianggap “mendatangkan contoh” mengerahkan massa dalam jumlah banyak dengan tertib dan keamanan.

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS pada periode 2015-2020 ber visi “Berkhidmat untuk Rakyat melalui Peningkatan Peran Perempuan dan Ketahanan Keluarga.” Sebagai bagian dari PKS, BPKK tidak berdiri sendiri dalam hal mewujudkan ketahanan keluarga. Misi BPKK PKS adalah penguatan ketahanan keluarga Indonesia, penguatan paradigma ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas dan penokohan kader perempuan PKS serta optimalisasi hubungan kelembagaan perempuan. Kami meyakini bahwa penguatan peran perempuan PKS harus dibangun atas dua dimensi peran, yaitu peran asasi sebagai istri dan ibu serta peran perluasan sebagai anggota masyarakat yang memiliki kewajiban menyuarakan kepentingan politik perempuan.

Pengokohan ketahanan keluarga Indonesia sebagai basis ketahanan nasional adalah bingkai aktivitas yang kami lakukan sebagai kader partai dakwah. Kanal ini merupakan sarana komunikasi, pembelajaran politik (edukasi) bagi masyarakat serta wahana informasi aktivitas dakwah perempuan PKS terkait perempuan, anak dan keluarga.

Seperti penjelasan dari Santy R Madjid tersebut bahwa partai memberikan amanat kepada kader perempuan untuk mengemban tugasnya pada bidang ketahanan keluarga. Program kerja tersebut merupakan kegiatan dalam pengawasan kader perempuan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) seperti yang diungkapkan oleh Siti Marsiyah di bawah ini:

“Tugas yang diberikan partai: hampir di semua bidang ada kader perempuan, adapun bidang yang khusus perempuan ada di BPKK. Di mana prioritas tugasnya adalah menguatkan kekokohan keluarga dan menjadikan kader perempuan PKS pelopor kebaikan di lingkungannya” (10 Oktober 2020)

Menurut Santy R Madjid memaparkan bahwa tugas yang diberikan partai secara komprehensif dan menyeluruh sama. Tanpa ada perbedaan gender. Tugas yang diberikan sama-sama seperti tugas yang dimiliki oleh partai politik komunikasi politik, negosiasi, dan *lobby* politik. Namun program kerja yang dicanangkan

oleh kader perempuan berbeda dengan program kerja yang ada di lain di partai.

Seperti yang dijelaskan oleh Hj. Lina Ariani, S. Si., Apt (46 tahun),

“Tidak ada perbedaan yang spesifik, semua sama ketika punya potensi kapabilitas bisa berperan dengan optimal dengan tetap menjaga akhlak Islami. Peran spesifik ada di masing masing bidang misalnya bidang kepemudaan, bidang politik hukum, bidang BPKK yang sasaran utamanya keluarga, anak dan kaum perempuan” (10 Oktober, 2020).

Untuk menjadi perwakilan dalam partai atau diusulkan menjadi calon legislatif, criteria yang ditentukan oleh PKS adalah memuat prinsip “siapa yang berkualitas, maka dicalonkan.” Seperti yang diungkapkan oleh Hj. Lina Ariani,

“Secara umum iya... hampir semua kegiatan kepartai ada kader perempuan yang terlibat di dalamnya. Contoh: Bu Hj. Lilik Hendarwati Sekum DPW PKS Jatim saat ini, beliau anggota dewan, juga anggota legislatif DPRD propinsi Jatim. . . Di mana beliau juga masuk di DPTW PKS Jatim dewan pimpinan Tinggi wilayah” (10 Oktober, 2020).

Selain itu beliau menambahkan sebagai berikut.

“Punya integritas, kapabilita, pribadi yang baik yang diterima masyarakat. Punya basis massa. Utamanya kader yang berada di struktur pengurus, dan kader dengan kriteria di atas. Punya jiwa dan semangat untuk berkhidmat untuk ummat bangsa dan Negara” (Wawancara online, 10 Oktober 2020).

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada tiga lembaga negara yang saling berkaitan namun memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Ketiga lembaga tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dimana, ketiganya merupakan lembaga negara yang dapat mendukung jalannya pemerintahan sesuai fungsi dan tugasnya.

Lembaga Legislatif atau parlemen adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi implementasi undang-undang yang ada oleh badan eksekutif. Setiap anggota lembaga legislatif dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan langsung dipilih oleh rakyat.

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi yang ada di Indonesia. Namun, setelah adanya amandemen maka MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, sehingga kedudukannya sejajar dengan lembaga Negara lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang telah terpilih dalam pemilu dengan masa jabatan selama lima tahun. Dalam menjalankan fungsinya, MPR mempunyai beberapa tugas yaitu: (1) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; (2) melantik presiden serta wakil presiden; (3) memberhentikan presiden serta

wakil presiden mengikuti peraturan masa jabatan yang telah diatur dalam UUD.

Kehadiran DPR merupakan salah satu bukti bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi karena para anggota DPR RI dipilih oleh rakyat lewat pemilu setiap lima tahun sekali. DPR mempunyai kedudukan di tingkat pusat sedangkan yang berada di tingkat Provinsi disebut DPRD dan ditingkat kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten. Sebagai salah satu Badan Legislatif yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, maka beberapa tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan baik yaitu: (1) meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi seluruh masyarakat Indonesia; (2). Melakukan penyelidikan akan suatu kebijakan pemerintah yang dicurigai bertentangan dengan undang-undang; (3) Memberi pendapat mengenai kebijakan dalam negeri yang menimbulkan kejadian luar biasa dan ikut menyumbang solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Prinsip yang terkandung dalam Partai Keadilan Sejahtera menyebutkan, bahwa perempuan yang diusulkan untuk menjadi dewan legislatif harus memiliki ridho atau izin dari keluarga (suami dan anak-anaknya). Dukungan dari keluarga di berikan karena semua anggota PKS selalu di beri pembinaan rutin. Apapun posisinya dan dimanapun dia ditempatkan baik suami istri maupun anak-anak yang sudah memungkinkan harus mengikuti pembinaan. Dari situ dibangun pemahaman yang baik dan yang benar bahwa semua kontribusi anggota adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara. Langkah ini dirasa mampu untuk meningkatkan kinerja dari para kader perempuan agar lebih leluasa untuk melakukan tugasnya mengabdikan kepada negara dan umat. Seperti yang diungkapkan oleh Siti Marsiyah di bawah ini:

“Dengan berbagai pertimbangan sesuai kapasitas dan skill yang dimiliki kader. Bagi kami kader perempuan PKS tugas partai adalah amanah bukan kehormatan atau prestise, sehingga tugas apapun sebisa mungkin kita tunaikan dengan segenap kemampuan. Bagi yang sudah berkeluarga tentu atas izin suaminya” (Wawancara online, 09 Oktober 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa prinsip utama agar perempuan dapat mencalonkan diri sebagai legislatif adalah dengan meminta izin kepada keluarganya. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai dengan menjalankan amanat dari umat. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Santy R Madjid di bawah ini:

“Secara prinsip tidak ada, hanya menyesuaikan sesuai kapasitas dan kesediaan kader perempuan. Jadi di PKS prinsipnya bukan laki-laki atau

perempuan tapi terhadap sebuah tugas. Maka siapa yang lebih pas untuk diberikan amanah, siapa yang kapasitasnya, kualitas, dan kapabilitasnya cocok ditempatkan disuatu tugas Karenanya di PKS wilayah misalnya, ada Kabid Ekuintek yang perempuan, Kemudian ada yang ditugaskan sebagai Wakil ketua DPD PKS, Sekertaris Umum DPD PKS, Bendahara PKS. Ada juga yang diamanahkan sebagai wakil ketua DPRD di kota Surabaya misalnya” (Wawancara online, 07 Oktober 2020).

Bukan kader laki-laki saja yang menjadi prioritas utama dalam partai, namun kader perempuan yang memiliki kualitas juga akan dicalonkan menjadi perwakilan partai dalam kontestasi, sehingga di PKS sendiri keberadaan kader perempuan juga diperlukan untuk membangun dan menarik simpatisan agar dapat memilih partai. Ibu Lilik Hendarwati selain menjadi sekretaris umum di DPW PKS Jawa Timur juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Konsep gender menggambarkan karakteristik laki-laki maupun perempuan dan relasinya dalam bermasyarakat. Laki-laki selalu dikonstruksi sebagai makhluk yang kuat, jantan, perkasa, dan rasional. Ciri tersebut dinamakan maskulin. Sedangkan perempuan dikonstruksi sebagai makhluk yang perasa, emosional, lemah lembut, dan keibuan. Konsep maskulin dan feminine kerap terjadi dalam kehidupan di masyarakat, entah itu laki-laki dan perempuan mendapatkan kerugian atas hal tersebut.

Bias gender yang dialami oleh perempuan dan laki-laki menimbulkan banyak sekali diskriminasi. Salah satunya adalah pemangkasan peran dalam dunia publik. Perempuan diibaratkan sebagai kaum lemah, sehingga diberikan tugas yang sederhana dan minim. Sedangkan laki-laki diibaratkan sebagai kaum perkasa, kuat dan dapat melalui segala tantangan, sehingga ia diberikan kinerja atau peran yang cukup banyak dan berat.

Dalam ranah politik, laki-laki diibaratkan sebagai sosok pemimpin dan perempuan tidak dapat menjadi pemimpin. Pada ideologi gender tradisional, laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih daripada perempuan, di semua lini kehidupan perempuan dianggap lemah dan tak berdaya. Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat akhirnya membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.

Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta

hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Namun, di PKS sendiri perempuan tidak dibatasi untuk menjadi seorang pemimpin. Upaya yang lain adalah tetap memberikan kesempatan perempuan untuk dapat memimpin dengan tugas dan program kerja yang dapat mereka melakukan serta tidak melanggar kodratnya sebagai ibu rumah tangga (mengurus keluarga), seperti yang disampaikan oleh Santy R Madjid di bawah ini:

“Meski ada suatu bidang yang memang khusus membahas bab Perempuan Anak dan Keluarga yaitu Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. ini fokus pada tiga aspek. Syarat untuk kader perempuan yang diajukan dalam pemilu legislatif sama saja. Pertimbangannya adalah kualitas, kapasitas, dan kapabilitas. Tentu dengan meminta kerelaan (ridho) suami dan keluarga. Dan umumnya jarang ada masalah ketika istri diminta maju menjadi Caleg dan sekarang sudah mulai ada yang diajukan untuk pilkada, maka Alhamdulillah suami dan keluarga rata-rata mendukung.” (Wawancara online, 09 Oktober 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa memang bahwa kader perempuan memiliki program kerja khusus. Dan program kerja ini memiliki perbedaan dengan partai politik yang lain. Yang menjadi perbedaan mendasar partai PKS dengan partai yang lain selain ideologinya ada juga program kerjanya yaitu ketahanan keluarga.

Kader perempuan memiliki kesempatan untuk menjadi legislatif sama dengan kader laki-laki. Seperti yang diungkapkan oleh HJ. Lina Ariani,

“di PKS ini, seperti yang saya ungkapkan tadi kader perempuan dan kader laki-laki bisa saja menjadi anggota legislatif atau bisa saja kita usulkan secara mudah untuk mewakili partai politik dalam kontestasi. Namun individu yang kita calonkan ini nanti memiliki kualitas yang berbeda dengan kader yang lain. Kualitas yang dimaksud adalah para kader memiliki kemampuan kepemimpinan, berakhlak, kemampuan untuk bernegosiasi komunikasi *lobby* politik, sehingga ketika memiliki kemampuan tersebut ya diajukan dalam pemilihan. Partai tidak membatasi perempuan berapa, lebih sedikit daripada laki-laki. Tidak seperti itu. Semuanya bisa dijadikan pemimpin dan anggota legislatif ketika memiliki kemampuan yang baik.” (Wawancara online, 15 Oktober 2020).

Hal serupa juga disampaikan oleh Santy R Madjid sebagai berikut.

“kalau yang saya ketahui ya mbak, tidak ada pembatasan bahwa perempuan satu aja laki-laki yang banyak tidak seperti itu mbak. Malah di

Surabaya ini kader perempuan PKS memiliki anggota legislatif yang kualitasnya baik. Kualitasnya tinggi dan memiliki dukungan yang lumayan banyak mbak. Ya seperti bu Hj. Lina itu beliau kan DPRD Surabaya juga memiliki kualitas yang bagus serta dukungan yang banyak.” (Wawancara online).

Hj. Lilik Hendarwati juga mengungkapkan hal sama sebagai berikut.

“Kalau untuk pembatasan peran kerja di partai tidak ada mbak. Karena pada dasarnya semua disamakan. Semua diberi kesempatan untuk dapat menikmati kursi DPR dapat memimpin dan berjuang demi umat. Namun, kader perempuan memiliki *jobdisc* yang berbeda. Kita memiliki program kerja yang meningkatkan kesejahteraan keluarga mbak, ketahanan keluarga. dan kalau dilihat di partai lain tidak ada”

Berdasarkan ungkapan wawancara yang diutarakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di partai PKS tidak memandang gender dalam mengusulkan calon legislatif sebagai perwakilannya. Mereka melihat kompetensi dan kualitas dari individu kader tersebut. Kualitas tersebut sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan di era ini. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai modal menjadi pemimpin yaitu manajemen, persamaan, bekerja sama, motivasi dan tekad, keterampilan komunikasi, dan antusiasme.

Pada kemampuan manajemen, pemimpin harus memiliki kemampuan manajemen yang baik, yaitu dapat merencanakan segala sesuatu secara matang dan tersusun secara sistematis. Seorang pemimpin harus memiliki hubungan yang baik untuk menjalin kerjasama. Pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi dengan baik. Keterampilan berkomunikasi sangat diperlukan agar bisa menjalin hubungan dengan baik. Seorang pemimpin juga harus mempunyai antusiasme yang besar karena hal tersebut dapat menginspirasi dan memotivasi orang sekitar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada kader perempuan di PKS DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Jawa Timur menjelaskan bahwa mereka juga dapat diberikan kinerja atau kepercayaan menjadi pemimpin atau perwakilan partai dalam pilihan legislatif. Pemilihan kader untuk menjadi legislatif adalah dengan unsur kemampuan kualitas kader, bukan berdasarkan gender dan jenis kelamin.

Bargaining Power merupakan tindakan yang dilakukan setiap individu untuk mempengaruhi pihak lawan agar menyetujui keinginannya sehingga kepentingan dapat dicapai sesuai yang diharapkan (Schelling, 1960:21). Kader perempuan PKS masuk dalam anggota BPH memiliki kendali di setiap kegiatan organisasi yaitu menjalankan fungsi kontrol dan

mengkoordinir setiap anggota. Mereka juga memiliki peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan dalam masalah partai. *Bargaining power* menyiratkan bahwa keuntungan yang diperoleh akan diberikan kepada yang kuat, cekatan, dan yang terampil. Namun, dalam *bargaining power* juga terdapat taktik yang harus dimainkan (Schelling, 1960:22).

Bargaining power juga digambarkan sebagai kekuatan untuk menipu dan menggertak, yaitu kemampuan meyakinkan pihak lawan bahwa apa yang dikemukakan adalah yang terbaik. Inti dari *bargaining power* adalah kemampuan suatu pihak untuk mempengaruhi pihak lawan dalam negosiasi (Schelling, 1960:23). *Bargaining power* adalah situasi penting dalam tawar-menawar, pihak yang mempunyai posisi *bargaining power* yang kuat akan membawa keberhasilan sehingga dapat mencapai kesepakatan dan mengimplementasikannya (Sekarpuri, 2018:16).

Pengambilan Keputusan Bersumber pada Intuisi ialah Pengambilan keputusan yang bersumber pada perasaan hati yang kerap kali bertabiat subyektif. Tetapi, pengambilan keputusan yang bersumber pada intuisi memerlukan waktu yang pendek, buat masalah-masalah yang akibatnya terbatas, pada biasanya pengambilan keputusan yang bertabiat intuitif hendak membagikan kepuasan sepihak serta bertabiat perasaan. Sering perempuan diberi stigma tidak memiliki keputusan yang bersifat realisti, keputusan mereka dianggap sebagai keputusan yang subjektif. Keputusan yang bersifat subjektif adalah pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga gampang buat memutuskan. Keputusan bertabiat subjektif ini pula umumnya dilandasi oleh perasaan.

Dalam pengambilan keputusan di DPW PKS Jawa Timur, kader perempuan ternyata memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan. Pengambilan Keputusan Rasional ialah Pengambilan keputusan yang terbuat bersumber pada pertimbangan rasional berfikir serta lebih bertabiat objektif. Keputusan yang bertabiat rasional berkaitan dengan energi guna pikir. Masalah-masalah yang dialami ialah permasalahan yang membutuhkan pemecahan rasional. Keputusan yang terbuat bersumber pada pertimbangan rasional lebih bertabiat objektif serta bisa diukur. Kader perempuan memiliki kesempatan untuk mengutarakan opininya, dan mereka menjadi peranan penting karena menduduki struktur tertinggi di partai (sebagai BPH Partai).

Kader Perempuan PKS mempunyai Pengambilan Keputusan Bersumber pada Pengalaman ialah Pengambilan keputusan yang bersumber pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh sehingga bisa digunakan buat memperkirakan apa yang jadi latar balik permasalahan serta gimana arah penyelesaiannya.

Keputusan yang bersumber pada pengalaman sangat berguna untuk pengetahuan instan di setelah itu hari. Pengambilan keputusan bersumber pada kenyataan ialah pengambilan keputusan yang terbuat bersumber pada informasi empiris, sehingga bisa membagikan keputusan yang valid sehingga tingkatan keyakinan terhadap pengambil keputusan bisa lebih besar. Sebutan kenyataan butuh berhubungan dengan sebutan informasi serta data.

Kumpulan kenyataan yang sudah dikelompokkan secara sistematis dinamakan informasi. Sebaliknya, data merupakan hasil pengolahan dari informasi. Dengan demikian, informasi wajib diolah lebih dahulu jadi data yang setelah itu dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pengambilan Keputusan Bersumber pada Wewenang ialah pengambilan keputusan yang bersumber pada atas wewenang/ peran yang dipunyai oleh seorang yang jadi pemimpin. Tiap orang yang jadi pimpinan organisasi memiliki tugas serta wewenang buat mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan aktivitas demi tercapainya tujuan organisasi yang efisien serta efektif.

Schelling menjelaskan bahwa posisi *bargaining power* dapat diketahui dengan melihat bagaimana kemampuan suatu pihak dalam memberikan ancaman (*threat*) dan janji (*promise*) yang dipercayai pihak lawan. Janji dan ancaman berbicara tentang niat atau rencana dari pihak utama kepada pihak lawan. Kemampuan untuk memberikan ancaman dan janji yang kredibel akan membentuk *bargaining power* yang kuat, sehingga akan mendapatkan kesepakatan untuk mengikuti tindakan yang diharapkan (Sekarpuri, 2018:17).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan lebih banyak memberikan janji (*promise*) terhadap masyarakat umum. Janji tersebut berupa pemberian kinerja kepada masyarakat atau dalam PKS yang disebut ummat. Kader perempuan memiliki janji agar dapat memberikan upaya kepada pemerintah berdasarkan keinginan umat.

Partai memiliki fungsi sebagai wadah menampung aspirasi rakyat. Para kader perempuan memiliki janji untuk menampung suara rakyat. Janji tersebut diberikan agar partai memiliki dukungan besar dari masyarakat dan dapat mengambil posisi strategis di pemerintah. Janji-janji yang diungkapkan tersebut merupakan kesepakatan yang didiskusikan bersama dengan kader perempuan yang lain.

Ancaman (*threat*) menurut Thomas Schelling merupakan niat atau rencana untuk melakukan suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebagai akibat dari dilaksanakannya suatu tindakan sehingga pihak tidak akan melaksanakan tindakan tersebut (Schelling, 1960:35-36). Namun di samping itu juga terdapat janji (*promise*) yaitu suatu rencana dalam tawar-menawar untuk memberikan keuntungan bagi pihak lain, apabila kesepakatan mengambil bagian dari

pihak utama (Schelling, 1960:44). Janji yang diberikan dimaksudkan agar memberikan efek saling menguntungkan, jadi kesepakatan tidak boleh menghalangi kepentingan pihak tersebut.

Karakter menggertak dan mengancam bukan karakter yang sejalan dengan karakteristik feminine perempuan. Karena itu, jika berangkat dari anggapan bahwa perempuan itu berkarakter feminin, maka peran itu tentu sulit dilaksanakan. Dengan kata lain, jika harus berkomunikasi politik, perempuan telah terhambat secara kultural.

Fakta yang didapatkan melalui hasil wawancara terhadap anggota kader perempuan PKS di Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur menyebutkan bahwa kader perempuan ikut andil dalam struktur fungsional tertinggi partai, serta dapat dijadikan sebagai legislatif. Dalam struktur tertinggi partai atau dalam kepengurusan Badan Pengurus Harian Partai (ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara) mereka memiliki peranan penting dalam memberikan keputusan dalam masalah partai. Sedangkan untuk menjadi perwakilan di legislatif menunjukkan bahwa kader perempuan memiliki kekuatan dalam politik.

Seperti yang diungkapkan oleh Schelling bahwa *Bargaining power* merupakan kekuatan untuk menipu dan menggertak, yaitu kemampuan meyakinkan pihak lawan bahwa apa yang dikemukakan adalah yang terbaik. Kekuatan tersebut terlihat bahwa kader perempuan memiliki kesempatan untuk mengatur anggota PKS. Berperan menjadi Badan Pengurus Harian, menjadikan kader perempuan memiliki kekuatan dalam mengatur setiap anggota yang tergabung dalam sekretariat bidang. Selain itu, setiap kebijakan atau aturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh partai mereka memiliki andil untuk menolak merevisi dan menambahkan.

Tabel 3 Cara yang dilakukan perempuan untuk membangun *power*nya

No	Cara yang dilakukan	Hasil yang diperoleh
1.	Aktif dalam kegiatan internal (<i>threat</i>)	Kader perempuan masuk dalam BPH yang memiliki kendali di setiap kegiatan organisasi yaitu menjalankan fungsi kontrol dan mengkoordinir setiap anggota. Mereka juga memiliki peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan dalam masalah partai.
2.	Aktif dalam kegiatan eksternal (<i>promise</i>)	memiliki pribadi yg baik yang diterima masyarakat atau dalam PKS disebut ummat dan mempunyaibasis masa sehingga dapat dicalonkan menjadi calon legislatif. kader perempuan PKS ada yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan masuk di DPTW PKS Jatim dewan pimpinan Tinggi wilayah
3.	Mengikuti pembinaan rutin	Selalu siap dalam menjalankan seluruh tugas yang di berikan partai

Sumber: data primer

Partisipasi politik perempuan di legislative masih rendah. Penelitian Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa *Affirmative Action* dengan margin minimal 30% bagi partai politik belum yang diharapkan dapat membuka kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik belum berdampak sistematis di DPRD provinsi Jawa Tengah. Jika dicermati, penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi kader perempuan PKS sebagai anggota legislatif juga masih rendah, meskipun partisipasinya dalam kegiatan partai di Jawa Timur cukup tinggi.

Berdasarkan hasil analisis, maka pandangan Schelling tentang *Bargaining power* menyiratkan bahwa keuntungan yang diperoleh akan diberikan kepada mereka yang kuat, cekatan, dan yang terampil. Seperti pada kader perempuan PKS pada DPW Jawa Timur, kader perempuan juga memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di partai. Para kader perempuan memiliki ruang untuk beraktivitas di ruang publik. Kapasitas diri perempuan menentukan ruang dan posisinya. Semakin berkualitas perempuan, semakin kuat pula bargaining power-nya perempuan sebagai kader partai. Belum banyak perempuan yang memiliki *bargaining position* yang kuat. Mungkin ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan belum banyak yang berada di posisi legislative mewakili partainya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa *bargaining power* kader perempuan di dewan pengurus wilayah PKS Jawa Timur terlihat dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan partai. Kapasitas individual perempuan menjadi hal penting dalam penentuan *bargaining position*-nya. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) Kader perempuan menjadi bagian dari struktur fungsional partai tinggi pada BPH. Kader perempuan memiliki kekuatan untuk memberikan pengambilan keputusan atau kebijakan partai karena mereka memiliki jabatan atau posisi tertinggi di partai yaitu sebagai pengurus Badan Harian. Peran dan tugas dari BPH atau pengurus inti adalah penanggung jawab dari departemen yang dipimpin. (2) Kader perempuan berkualitas diusung menjadi calon legislatif. Di PKS kader perempuan juga memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai legislatif serta perwakilan partai dalam pemilihan umum atau kontestasi politik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan yaitu sebagai berikut. Saran pertama diberikan kepada kader perempuan yaitu seluruh anggota

perempuan agar lebih aktif dalam kepengurusan dan diharapkan dapat memiliki pengembangan program kerja selain di bidang perempuan.

Saran yang kedua diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera agar tetap mempertahankan komitmennya untuk selalu memberikan ruang kepada perempuan untuk lebih aktif dalam setiap kegiatan partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 2014. *WIB*. <http://PKS.id/file/ad-art-PKS>. Diakses pada 05 Desember 2014 pukul 16:39
- Dewi, M.A., 2010. Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol. 3 (2). Hal. 102-111
- Fitriyah, Afidatul dan M. Y. Tiya Tinov. 2013. Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu Legislatif 2009. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. Vol. 11 (01). Hal. 01-70
- Hermaleni, Tesi. 2018. Perbedaan Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Ideologi Gender Pada Istri Yang Bekerja. *Jurnal RAP UNP*. Vol. 9 (2). Hal. 185-194
- Hernita, Sahban. 2016. Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia. *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*. Hal. 57-72
- KPU Jawa Timur. 2018. <https://kpujatim.go.id/dct-pemilu>. Terbit Tanggal 21 September 2018 pukul 00:09
- Malaka, mashur. 2014. Keterlibatan Perempuan di Berbagai Aspek dalam Perspektif Islam. *Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-31*. Hal. 65-79
- Nimmo, Dan. 2011. *Komunikasi Politik (Komunikaytor, Peran dan Media)*. Bandung: Rosdakarya.
- Pohan, Alqanith. 2014. Gender Dalam Komunikasi Politik Aktivis Partai Islam (Analisis Terhadap Aktivis PBB, PPP dan PKS di Padang). *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*. Vol. 2 (1). Hal. 30-41.
- Pradipta, Hikmia Rahadini. 2018. Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 7 (2). Hal. 01-10
- Puspitarini, Yanuari Dwi. 2016. Ideologi Gender dalam Konstruksi Kurikulum Program Studi (Kajian di Program Studi Pendidikan Guru PAUD dan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang). *Skripsi*. Semarang: UNNES.

- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Schelling, C. Thomas. 1960. *The Strategy of Conflict*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sekarpuri, Nadyara Nafisa. 2018. *Upaya Palestina Melalui Instrumen Hukum Dengan International criminal court (ICC): Analisa Terhadap Posisi Bargaining Power Palestina dalam Negosiasi*. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Solihah, Imroatus. 2018. *Peran dan Keterwakilan Politik Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang (Studi di DPD PKS Kota Malang)*. Tesis. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Sutarso, Joko. 2011. Konstruksi Isu Gender dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004. *Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*. Vol. 2 (2). Hal. 03-13
- Wahyudi, Very. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Politik Islam*. Vol. 1 (1). Hal. 60-75.